

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yaitu situasi politik Yogyakarta dari masa pendudukan Jepang sampai dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, faktor-faktor politik yang mendorong dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, akibat politik yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Amanat 5 September 1945.

Metode yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan Jepang yang berlangsung antara tahun 1942-1945 memberikan kesempatan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengatur sendiri pemerintahan wilayah Yogyakarta, melalui tindakannya menghapuskan jabatan *Pepatih Dalem*. Penghapusan jabatan *Pepatih Dalem* ini mempunyai implikasi Sri Sultan sendirilah yang mengambil alih kepemimpinan secara langsung atas daerah Yogyakarta.

Dengan demikian Sri Sultan Hamengku Buwono IX dapat mewujudkan pemikirannya (anti imperialisme dan kolonialisme) melalui tindakannya mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu peran aktif dari seluruh komponen masyarakat Yogyakarta semakin menambah kekuatan melawan Jepang. Persatuan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan seluruh komponen masyarakat Yogyakarta inilah akhirnya terwujud di dalam Amanat 5 September 1945.

Konsekuensi dikeluarkannya Amanat 5 September 1945, menyebabkan baik Sri Sultan dan seluruh komponen masyarakat Yogyakarta memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempertahankan tekadnya itu. Melalui Amanat 5 September 1945 Sri Sultan beserta seluruh komponen masyarakat Yogyakarta mengkonsolidasikan kekuatan untuk melawan penjajah Jepang. Kekuatan ini semakin lama tidak dapat dibendung lagi yang mengakibatkan terjadinya konflik dengan pihak Jepang baik secara diplomasi maupun kekerasan. Puncak dari konflik itu terakumulasi di dalam pertempuran Kota Baru pada 7 Oktober 1945.

**ABSTRACT**

This research aimed at finding answers for some questions about political situation in Yogyakarta from the colonialism of Japanese to the issue of 5 September 1945 Instruction, political factors that urged the issue of 5 September 1945 Instruction, and effect of the issue of 5 September 1945 Instruction.

The method used in this research was analytical descriptive.

The result of this thesis showed that the system of Japanese government in 1942 – 1945 had given opportunity for Sri Sultan Hamengku Buwono IX to govern Yogyakarta without Japanese's intervention, mentioned by the deletion of Papatih Dalem position. This action had the implication that Sri Sultan himself that took over the leadership of Yogyakarta directly.

So, Sri Sultan Hamengku Buwono IX could realize his thought (anti imperialism and colonialism) through an action that supported the independence of Indonesia. Besides, active supports from all components in Yogyakarta increased the force to fight against Japanese. The unity of Sri Sultan Hamengku Buwono IX and all components in Yogyakarta at last was realized in 5 September 1945 Instruction.

The consequence of the issue of 5 September 1945 Instruction was that both Sri Sultan and all components in Yogyakarta had definite responsibility to do their struggle. Through 5 September 1945 Instruction, Sri Sultan together with all components in Yogyakarta consolidated them to fight against Japanese. Through time, this force was irresistible. Conflicts against Japanese, both diplomacy and physic could not be avoided. And the final was a war in Kota Baru in 7 October 1945.